

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran Kolonial Belanda dengan sistem politik kolonialnya di Nusantara membawa bencana bagi kaum pribumi atas eksploitasi yang dilakukan baik secara ekonomi dan sumber daya alam, hal ini tentunya menimbulkan perlawanan dari kaum pribumi untuk terbebas dari penjajahan kolonial Belanda. Perlawanan bergejolak di berbagai daerah. Rakyat yang pada saat itu kehilangan kebebasan serta tekanan, kemudian digunakan sebagai kekuatan nasionalisme. Keadaan inilah mendorong timbulnya kesadaran nasional yang diperjuangkan dengan berbagai cara.

Politik kolonial yang diterapkan oleh Belanda tidak lagi berlaku, karena adanya perbedaan kondisi ekonomi. Perbedaan kondisi ekonomi ini juga menyebabkan perbedaan terhadap fungsi koloni itu sendiri. Pemerintah Belanda telah memanfaatkan beberapa jenis hasil perkebunan Nusantara yang pengelolaan diatur oleh pihak swasta. Keuntungan eksploitasi yang dilakukan secara liberal itu cukup banyak, namun koloni melupakan prinsip humanisme. Sehingga pada awal abad ke-20 mengganti sistem politik mereka dengan Politik Etis.

Perkembangan pendidikan memang tidak terlepas dari program Politik Etis yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah pemikiran bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral mensejahterakan penduduk Hindia

Belanda. Dalam artikel Van Deventer yang terbit pada 1899 di Majalah De Gids berjudul “Een Eereschuld” atau “Hutang Kehormatan”, dijelaskan bahwa terjadi kekosongan kas Negara Belanda. Kekosongan dari kas itu telah diisi oleh orang Indonesia, dengan kata lain Indonesia telah membantu Belanda. Sebab itu sudah sewajarnya bila kebaikan budi orang Indonesia itu dibayar kembali (Sejarah Pergerakan Nasional, 1994 : 16).

Terdapat tiga bidang dalam pelaksanaan Politik Etis yaitu pendidikan (edukasi), pertanian (irigasi) dan perpindahan penduduk (transmigrasi atau emigrasi). Dengan adanya politik etis, terutama dalam bidang pendidikan telah membuka wawasan bagi penduduk Indonesia saat itu. Belanda tidak mampu membendung lahirnya golongan elite atau kaum muda terpelajar, golongan baru yang membawa ide-ide pada kesadaran kebangsaan yang semakin mendalam. Kaum muda terpelajar memahami bahwa mereka tidak mampu mendapat tempat di dalam birokrasi pemerintahan Belanda, sehingga mereka memutuskan untuk berdiri dikaki sendiri. Kaum muda terpelajar ini kemudian telah memelopori lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia.

Kebangkitan nasional ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai organisasi pergerakan oleh kalangan muda yang menjunjung ideologi kemajuan dan kebangsaan. Bahkan juga politik untuk pembebasan rakyat dari penjajahan. Organisasi yang berkembang di era kebangkitan nasional tumbuh berdasarkan corak atau sifat yang berbeda-beda, antara lain : Bercorak

keagamaan atau sekuler, bercorak kedaerahan atau bersifat nasional, kooperatif atau non-kooperatif, pemuda atau wanita.

Berbagai organisasi pergerakan nasional tersebut belum mampu menciptakan persatuan yang kokoh untuk bersama-sama melawan penjajah. Sebab masih memikirkan bagaimana organisasinya berkembang. Kondisi tersebut menjadi pemikiran serius dari kalangan pemuda untuk mewujudkan gerakan persatuan dan kesatuan diantara berbagai organisasi.

Organisasi pertama yang ada di Indonesia dalam bentuk modern adalah Budi Utomo, oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye dikalangan priyayi Jawa antara 1906-1907. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Terbentuknya Budi Utomo memancing kesadaran untuk merdeka dari para pemuda Indonesia. Tujuan awal dari organisasi Budi Utomo bergerak dalam bidang sosial yang fokus pada masalah-masalah pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Istilah dari Budi Utomo berasal dari kata budi yang berarti baik atau luhur, menggambarkan bentuk perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat.

Keanggotaan dari Budi Utomo mulanya terbatas hanya pada orang Jawa dan Madura, kemudian meluas hingga ke Bali. Namun organisasi ini memiliki beberapa kendala dalam mewujudkan tujuannya, yakni : mengalami kesulitan finansial, lebih memajukan pendidikan kaum priyayi dibanding rakyat biasa, anggota hanya terdiri dari mahasiswa dan pelajar, bahasa belanda menjadi

prioritas dibandingkan Bahasa Indonesia dan pengaruh golongan priyayi yang mementingkan jabatan lebih kuat daripada yang nasionalis.

Meningkatnya kesadaran pemuda di tiap daerah, maka menyusullah organisasi-organisasi lainnya. Yaitu organisasi Tri Koro Dharmo pada tahun 1915 yang kemudian akan mengubah nama menjadi Jong Java. Jong Java lebih didominasi oleh para pemuda dengan suku Jawa (Pitut Soeharto, 1981 : 1-2). Sehingga daerah lain dengan para intelektualnya kemudian membentuk : Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Minahasa, Sekar Roekoen, Ambon Studiefonds, Jong Bataks Bond, Jong Islamiten Bond.

Mereka tetap memiliki tujuan yang sama, hingga saat melakukan kesepakatan dalam sebuah kongres pada 1928, yang didalamnya terdapat perwakilan dari setiap organisasi. Karena banyaknya kepentingan mempertahankan identitas kesukuan itu sendiri, di Sumatera terbentuk Jong Sumateranen Bond. Jong Sumateranen Bond berdiri pada 9 Desember 1917 yang diketuai oleh Tengku Mansyur yang berlatar belakang seorang pangeran dari Asahan, Sumatera Timur.

Hingga tahun 1922 perkembangan Jong Sumatranen Bond masih dalam keadaan baik, namun setelahnya semakin melemah. Menurut Hans Van Miert ada dua istilah yang menyebabkan kelemahan tersebut, yakni : scholenwaan (prasangka kesekolahan) dan rassenwaan (prasangka kesukuaan). Maksud dari istilah pertama adalah rasa superioritas pelajar terhadap yang satu dengan yang lainnya. Misalnya sekolah kedokteran lebih dihormati dari pada sekolah guru.

Sedangkan prasangka mengacu pada kontrovensi antara berbagai kelompok etnis di Sumatera. Jong Sumatranen Bond lebih dominan pelajar dengan suku Minangkabau.

Akibat hal tersebut Jong Sumatranen Bond sulit untuk berkembang, serta menimbulkan banyak konflik. Timbullah keluhan dan kritikan dari berbagai pemuda, terkhusus para pemuda Batak yang ada di Sumatranen Bond, namun tidak ditanggapi dengan cepat oleh pengurus utama. Hingga lahirlah sebuah kelompok muda baru bersifat kesukuan, yaitu Jong Bataks Bond pada tahun 1926. Para pemuda Sumatera yang bersuku Batak. Mereka juga akan memiliki peran dalam sebuah Kongres yang berisikan para Pemuda intelektual, dikenal sebagai kongres pemuda II. Jond Bataks Bond memang tidak cukup lama berdiri karena setiap organisasi akan melebur dalam sebuah kesadaran pemuda yang lebih kokoh, yaitu Indonesia Muda pada tahun 1929.

Kemudian berdasarkan uraian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERKEMBANGAN JONG BATAKS BOND (1926-1929)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dampak dari Politik Etis.
2. Perkembangan Kebangkitan Nasional.
3. Lahirnya organisasi-organisasi Pergerakan Nasional.
4. Berdirinya organisasi kepemudaan bersifat kedaerahaan.
5. Organisasi Jong Bataks Bond.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Jong Bataks Bond?
2. Bagaimana perkembangan Jong Bataks Bond?
3. Bagaimana peran Jong Bataks Bond dalam Sumpah Pemuda?
4. Bagaimana proses bubarnya Jong Bataks Bond?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang penulis kemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Jong Bataks Bond.
2. Untuk mengetahui perkembangan Jong Bataks Bond.

3. Untuk mengetahui peran Jong Bataks Bond dalam Sumpah Pemuda.
4. Untuk mengetahui proses meleburnya Jong Bataks Bond.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang Jong Bataks Bond.
2. Memberi informasi tentang berdiri, perkembangan, serta peran dari Jong Bataks Bond.
3. Sebagai bahan referensi komparasi(perbandingan) bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian pada permasalahan yang sama.
4. Sebagai penambahan dan keterampilan peneliti dalam pembuatan karya tulis ilmiah berupa skripsi.

